

IMPLEMENTASI FUNGSI KOORDINASI DALAM PEMERINTAHAN

(Studi Kasus Koordinasi Gubernur DIY dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

AGUS TIARMAN

20070520060

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2011**

IMPLEMENTASI FUNGSI KOORDINASI DALAM PEMERINTAHAN

(Studi Kasus Koordinasi Gubernur DIY dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul)

SKRIPSI

**Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta**



Disusun Oleh :

AGUS TIARMAN
20070520060

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2011**

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Agustus 2011

Tempat : R. Lab. IP

Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua

DR. Ulung Pribadi, M.Si

Penguji I

Penguji II

Drs. Muhamad Zaenuri, M.Si

DR. Suranto, M.Pol

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu
Persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1)
Tanggal : 04 Agustus 2011

DR. Suranto, M.Pol
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
SINOPSIS	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
1. Implementasi	7
2. Fungsi Koordinasi	9
a. Pengertian Koordinasi	9
b. Koordinasi Pemerintahan	11
c. Cara / Mekanisme Koordinasi Pemerintahan	17
d. Jenis / Macam Koordinasi	20
e. Manfaat Koordinasi	21
f. Faktor yang mempengaruhi Koordinasi dalam Pemerintahan	22
3. Batas Daerah	32
F. Kerangka Konsep	40
G. Definisi Operasional	40
H. Metode Penelitian	41

1. Jenis Penelitian.....	41
2. Lokasi Penelitian.....	41
3. Jenis Data	42
4. Teknik Pengumpulan Data.....	42
5. Analisis Data	43
BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN	45
A. Deskripsi Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	45
B. Gambaran Umum Kabupaten Sleman	62
C. Gambaran Umum Kabupaten Bantul	67
D. Gambaran Desa yang menjadi Sengketa	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Pelaksanaan Fungsi Koordinasi penyelesaian batas daerah	76
1. Koordinasi penelitian dokumen batas daerah	78
2. Koordinasi pelacakan batas daerah	87
3. Koordinasi pemasangan pilar batas;.....	106
4. Koordinasi pembuatan peta batas.....	110
B. Faktor yang mempengaruhi Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah ..	114
1. Wewenang dan tanggung jawab.....	114
2. Pengawasan dan observasi yang seksama.....	118
3. Kemudahan untuk menggunakan fasilitas efektif.....	119
4. Ketrampilan memanfaatkan kepemimpinan.	123
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SINOPSIS

Sengketa batas daerah antara Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Bantul Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di blok Santan, Tambakkraman dan Tambakbayan terjadi karena adanya tumpang tindih (*overlapping*) dalam peta desa. Faktor penyebab sengketa adalah faktor kepentingan dan faktor adanya konflik data sehingga menimbulkan sengketa batas daerah. Berdasar Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 20 pada dasarnya penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi difasilitasi oleh Gubernur dan keputusannya bersifat final. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur DIY dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul ? serta faktor apa yang mempengaruhi fungsi koordinasi yang dilakukan Gubernur DIY dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul ?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi untuk melengkapi informasi, interview yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur DIY dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dilakukan melalui:

1. Penelitian dokumen batas daerah dilakukan melalui koordinasi vertikal dengan mengundang dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk memberikan bukti otentik batas daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
2. Pelacakan batas daerah dilakukan dengan koordinasi fungsional dengan seluruh anggota Tim TPBD Provinsi DIY yang terkait dengan pelacakan batas daerah di wilayah sengketa.
3. Pemasangan pilar batas Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan koordinasi vertikal yaitu koordinasi antara pejabat- pejabat dan unit- unit terkait terkait di tingkat bawah untuk melakukan pemasangan pilar batas sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1983/PUM tertanggal 15 November 2010 yang menyatakan bahwa tiga blok wilayah sengketa masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sleman.
4. Pembuatan peta batas daerah dilakukan melalui Koodinasi koordinasi vertikal dengan Bakorsurtanal sebagai instansi yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan peta secara nasional.

Faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman adalah khususnya di Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan adalah faktor wewenang dan tanggung jawab, pengawasan dan observasi, kemudahan untuk menggunakan fasilitas efektif dan faktor keterampilan memanfaatkan kepemimpinan.